

## Pengaruh Tata Kelola Pemerintah Terhadap Kemiskinan di Negara-Negara ASEAN

Azmi Ilham Ramadhan<sup>1</sup>, Novya Zulva Riani<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang, Indonesia

\*Korespondensi: [azmiilham.ramadhan07@gmail.com](mailto:azmiilham.ramadhan07@gmail.com), [novyazr@gmail.com](mailto:novyazr@gmail.com)

### Info Artikel

#### Diterima:

05 Februari 2024

#### Disetujui:

23 Februari 2024

#### Terbit daring:

01 Maret 2024

DOI: -

### Sitasi:

Ilham, Azmi, R & Zulva, Novya, R (2024). Pengaruh Tata Kelola Pemerintah Terhadap Kemiskinan di Negara Negara ASEAN

### Abstract:

*This study aims to analyze the influence of government governance on poverty in ASEAN countries. This research is descriptive and associative type. The data used is secondary data from 8 countries in ASEAN in 2011-2020 obtained from the Asean Development Bank and the Worldwide Governance Indicators (WGI) of the World Bank with government governance variables divided into four dimensions, namely corruption control, political stability and absence of violence/ terrorism, quality of regulation, voice and accountability. This study uses panel data regression with the Fixed Effect Model approach assisted by Eviews 10. The results show that government governance simultaneously has a significant effect on poverty with the following details: 1) Control of corruption has a negative and insignificant effect on poverty in countries -ASEAN countries, 2) Political stability and the absence of violence/terrorism have a negative and significant effect on poverty in ASEAN countries, 3) Regulatory quality has a negative effect and there is no significant effect on poverty in ASEAN countries, 4) Voice and accountability have an effect positive and not significant to poverty in ASEAN countries.*

**Keywords :** Governance, poverty, Fixed Effect Model

### Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tata kelola pemerintah terhadap kemiskinan di negara-negara ASEAN. Penelitian ini berjenis deskriptif dan asosiatif. Data yang digunakan adalah data sekunder dari 8 negara di ASEAN pada tahun 2011-2020 yang diperoleh dari *Asean Development Bank* dan *Worldwide Governance Indicators (WGI) World Bank* dengan variabel tata kelola pemerintah dibagi menjadi empat dimensi yaitu pengendalian korupsi, stabilitas politik dan ketiadaan kerusuhan/terorisme, kualitas regulasi, suara dan akuntabilitas. Penelitian ini menggunakan regresi data panel dengan pendekatan *Fixed Effect Model* yang dibantu dengan *Eviews 10*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola pemerintah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan dengan rincian sebagai berikut : 1) Pengendalian korupsi memiliki pengaruh yang negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di negara-negara ASEAN, 2) Stabilitas politik dan ketiadaan kerusuhan/terorisme berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di negara-negara ASEAN, 3) Kualitas regulasi berpengaruh negatif dan tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap kemiskinan di negara-negara ASEAN, 4) Suara dan akuntabilitas berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di negara-negara ASEAN.

**Kata kunci :** Tata kelola pemerintah, kemiskinan, *Fixed Effect Model*

Kode Klasifikasi JEL : G3, P46

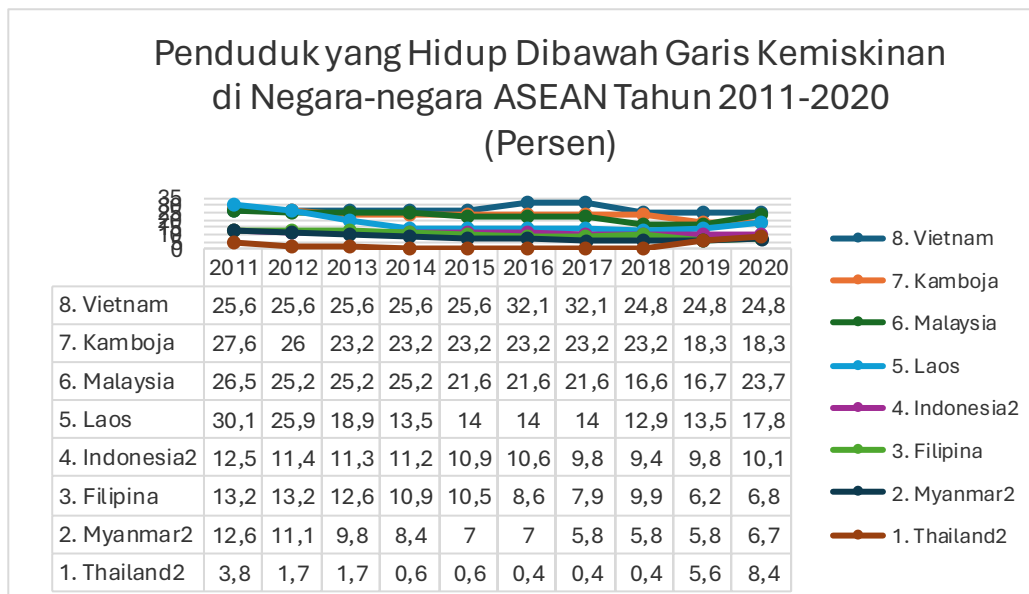
## PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan isu global yang menarik perhatian pemerintah ataupun lembaga masyarakat di seluruh dunia. Kemiskinan dipandang sebagai situasi kekurangan kebutuhan dasar hidup seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan yang layak. Sen and Fields (1983) menggambarkan kemiskinan sebagai suatu masalah kekurangan yang

berupa tidak dapat memenuhi terhadap kebutuhan dasar hidup atau relatif bila dibandingkan dengan standar hidup yang dinikmati oleh kelompok masyarakat lain dalam masyarakat yang berpenghasilan tinggi.

Masalah kemiskinan di negara-negara ASEAN merupakan permasalahan yang menarik untuk dibahas dan dicari solusinya. Menurut laporan *Asean Development Bank* (ADB) tahun 2022, sebanyak 4,7 juta orang terjerumus ke dalam kemiskinan ekstrem pada tahun 2021 yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 dan sebanyak 9,3 juta pekerja kehilangan pekerjaannya dibandingkan pada masa sebelum pandemi COVID-19 di Asia Tenggara. Pandemi menyebabkan peningkatan pengangguran, ketimpangan, serta kemiskinan yang memburuk terutama di kalangan perempuan, pekerja muda dan lansia.

Menurut Liu et al., (2020) salah satu cara paling penting untuk mengurangi kemiskinan adalah investasi keuangan publik berskala besar dan berkelanjutan. Penelitian menunjukkan pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap perbedaan struktural dalam efek pengurangan kemiskinan. Hal ini bukti bahwa pengeluaran untuk pendidikan, perawatan kesehatan, jaminan sosial dan infrastruktur menunjukkan efek baik terhadap pengentasan kemiskinan. Selanjutnya menemukan bahwa pengeluaran pemerintah tidak hanya mendorong pengurangan kemiskinan di wilayah tersebut, tetapi juga mengurangi kemiskinan di wilayah yang secara ekonomi dan geografis serupa.



Sumber : Asean Development Bank, 2022

### **Gambar 1 Persentase Penduduk yang Hidup di Bawah Garis Kemiskinan Di Negara-negara ASEAN 2011-2020**

Gambar 1 menunjukkan persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan di negara-negara ASEAN mengalami fluktuasi. Rata-rata persentase kemiskinan di negara-negara ASEAN dalam kurun waktu 10 tahun terakhir sekitar 15% dengan persentase rata-rata penduduk di bawah garis kemiskinan tertinggi adalah Myanmar sebesar 26,7% dan persentase rata-rata penduduk di bawah garis kemiskinan terendah adalah Malaysia sebesar 2,36%. Rendahnya penduduk miskin di Malaysia disebabkan oleh semakin luasnya lapangan kerja yang dapat mengurangi ketimpangan yang tinggi (Kamal Ramlan et al., 2011).

Kemiskinan dapat disebabkan oleh tata kelola pemerintah. Pemerintah sebagai pemangku kebijakan memiliki otoritas untuk melaksanakan kewajiban untuk menjaga stabilitas ekonomi suatu negara guna untuk mendorong laju perekonomian. Dalam mengatur

kebijakan, pemerintah tentunya harus memiliki kualitas kelembagaan yang kuat agar kebijakan yang diatur dapat berjalan dengan baik. Menurut Kazim (dalam Razak & Suhadak, 2019) *governance* merupakan proses penggunaan otoritas eksekutif pada praktik pengelolaan sumber daya sosial dan ekonomi dalam memajukan pembangunan masyarakat. Keberhasilan *good governance* ditentukan berdasarkan keterlibatan antara sektor pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Menurut teori, kebijakan desentralisasi memberikan berkontribusi baik terhadap pengentasan kemiskinan dan tata kelola pemerintahan, karena dengan desentralisasi masyarakat dapat mengontrol kinerja pemerintahan sehingga masyarakat dapat memberikan opini dan masukan kepada pemerintah. Akan tetapi, masyarakat juga dapat menolak pelaksanaan kebijakan desentralisasi apabila kebijakan yang digunakan untuk mengatasi kemiskinan justru disalahgunakan oleh pihak tertentu untuk meningkatkan beban ekonomi masyarakat tanpa memperhatikan layanan publik yang layak (Chubb & Peterson, 1989).

*Worldwide Governance Indicators* (WGI) *World Bank* mengukur tata kelola pemerintah menggunakan enam dimensi yaitu efektivitas pemerintah, supremasi hukum, pengendalian korupsi, stabilitas politik dan tidak adanya kekerasan, kualitas regulasi, suara dan akuntabilitas. Keenam dimensi ini akan mempengaruhi bagaimana pemerintah mampu mengatasi kemiskinan dengan efektif.

Dalam indeks pengendalian korupsi, korupsi merupakan masalah yang berkaitan erat dengan negara-negara berkembang. Korupsi di sektor publik dapat memperburuk kondisi kemiskinan di negara-negara yang berjuang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan transisi demokrasi.

Negara-negara yang mengalami kemiskinan kronis dipandang sebagai tempat berkembang biaknya korupsi yang disebabkan ketimpangan sosial dan pendapatan serta insentif ekonomi yang menyimpang. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Rahayu & Widodo (2012) yang mengungkapkan bahwa kemiskinan tidak mempengaruhi korupsi sementara korupsilah yang menyebabkan kemiskinan.

*Word Bank* mendefinisikan kemiskinan sebagai suatu keadaan dimana seseorang atau sekelompok masyarakat tidak mempunyai pilihan atau peluang meningkatkan taraf hidup untuk menjalani kehidupan yang sehat dan baik sesuai dengan standar hidup, memiliki harga diri dan dihargai oleh sesamanya (Yulianto, 2005).

Dalam laporan terbaru Bank Dunia yang bertajuk “*East Asia and Pasific economic Update october 2022*” menetapkan garis kemiskinan ekstrem dari U\$ 1,9 menjadi U\$ 2,15 per orang per hari. Perubahan ini mengacu pada paritas daya beli atau *purchasing power parities* (PPP) 2017, akibatnya orang kelas menengah bawah banyak yang jatuh miskin.

Menurut Chambers (2006), kemiskinan adalah kumpulan dari keterbatasan kondisi yang kurang menguntungkan serta saling terhubung satu sama lain yang menyebabkan seseorang sulit keluar dari kemiskinan. Kondisi kurang menguntungkan yang dimaksud di antaranya kelemahan fisik, guncangan sosial, keterasingan, tidak berdayaan, dan kemiskinan itu sendiri.

Kemiskinan struktural disebabkan oleh tatanan kelembagaan atau struktur sosial dalam masyarakat. Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagian besar sering membuat sekelompok masyarakat mengalami kerugian yang membuat masyarakat tersebut miskin. Kemiskinan tersebut terjadi dikarenakan minimnya masyarakat dalam memperoleh modal seperti pendidikan, lapangan kerja, kesehatan.

Pemerintah dalam mengendalikan kegiatan perekonomian dapat memperbaiki kemiskinan dengan memberikan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang layak, khususnya untuk masyarakat miskin. Kemiskinan yang disebabkan oleh struktur sosial membuat masyarakat terjebak dalam situasi miskin yang berlangsung turun temurun. Untuk mengatasi

kemiskinan struktural tersebut dapat dilakukan dengan cara perubahan secara menyeluruh atau mendasar dalam struktur yang terdapat dimasyarakat.

Menurut teori sosial demokrat, pemerintah/institusional memiliki peran penting dalam penanggulangan kemiskinan. Teori ini memiliki kelemahan yang membuat tingginya ketergantungan terhadap negara baik secara struktur ataupun institusi dalam penanggulangan kemiskinan. Meskipun begitu terdapat cara lain untuk mengatasi hal tersebut yaitu dengan kapabilitas kelompok miskin.

Dalam teori sosial demokrat, kemiskinan relatif lebih sulit di atasi dalam membentuk kebutuhan standar. Hal tersebut disebabkan karena kemiskinan dipandang sebagai kemampuan penduduk dalam memenuhi kehidupan bukan untuk memenuhi kebutuhan minimum hidup yang harus dipenuhi.

Pendekatan ini juga menciptakan dimensi baru kemiskinan yang disebabkan oleh institusi dan struktur yang menghambat akses masyarakat dalam memenuhi kebutuhan. Prinsip dari pendekatan ini adalah bahwa kemiskinan tidak semata-mata disebabkan oleh kemampuan seseorang, akan tetapi juga cara bagaimana institusi dan struktur masyarakat dapat menjamin kesetaraan antara kelompok yang berbeda untuk mencapai kemerdekaan.

*Governance* diartikan sebagai cara untuk mengelola penyelenggaraan publik. Menurut Wibowo (2020) kualitas tata kelola memiliki peran penting untuk menentukan kemajuan dalam suatu perekonomian. Kualitas penyelenggaraan pemerintahan tidak memiliki pendekatan kebijakan yang tepat untuk mengatasi masalah perekonomian. Indeks tata kelola lebih berperan secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daripada menjadi pembatas dalam kebijakan ekonomi pemerintah.

Berdasarkan teori Musgrave (dalam Palayukan, 2019) yang mengembangkan model pembangunan dengan menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah menjadi tiga kelompok pembangunan ekonomi di antaranya; peran alokasi, peran distribusi dan peran stabilisasi. Pada peranan alokasi, pemerintah berperan sebagai produsen yang penyediaan barang dan jasa untuk dapat dipergunakan oleh masyarakat.

Peran distribusi, pemerintah berperan sebagai pemerataan distribusi pendapatan masyarakat, agar tidak terjadinya kesenjangan akibat tidak meratanya pendapatan masyarakat. Dan pada peran stabilisasi, pemerintah berperan sebagai regulasi/regulator yang mengendalikan kegiatan perekonomian yang bermuara pada perumusan kebijakan ekonomi dinegara tersebut.

*Worldwide Governance Indicators* (WGI) World Bank membagi tata kelola dunia menjadi beberapa dimensi yang diantaranya :

### **Pengendalian Korupsi (*Control of corruption*)**

Dimensi pengendalian korupsi mengukur kewenangan sipil dalam menjalankan kekuasaan untuk kepentingan pribadi baik berupa korupsi kecil maupun korupsi besar, beserta perebutan kekuasaan bagi kelompok tertentu. Dimensi ini juga dapat mengukur kekuatan dan efektivitas kebijakan suatu negara serta kerangka kelembagaan untuk mencegah dan memberantas korupsi.

### **Stabilitas Politik dan Ketiadaan Kerusuhan/Terrorisme (*Politik stability and absence of violence/terrorism*)**

Dimensi stabilitas politik dan ketiadaan kerusuhan/terorisme merupakan ukuran persepsi atas probabilitas pemerintah didestabilisasi melalui cara-cara yang inkonstitusional atau dengan cara kekerasan, baik bermotif politik maupun terorisme. Menurut A. Zamakhsyari Baharuddin (2019) mendefinisikan stabilitas politik sebagai sejauh mana sistem politik mampu memanfaatkan kondisi dan kemampuan untuk mengatasi agar terhindar dari konflik yang terjadi dimasyarakat tanpa menggunakan kekerasan. Dengan kondisi stabilitas politik

yang baik di suatu negara dapat memberikan suasana dan lingkungan yang aman untuk pembangunan dan kemakmuran bagi masyarakat.

### **Kualitas Regulasi (*Regulatory quality*)**

Dimensi kualitas regulasi mengukur bagaimana kapabilitas pemerintah mampu dalam membuat dan menjalankan kebijakan dengan baik untuk memperbolehkan serta memperkenalkan pembangunan sektor swasta. *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) menyebutkan bahwa kualitas sistem peraturan suatu negara sangat tergantung pada pembuatan peraturan tersebut. Pemerintah memiliki peran dalam memastikan peraturan yang dibuat berjalan secara efisien untuk menurunkan tingkat kemiskinan di masyarakat. Indikator ini dapat menggabungkan berbagai indeks untuk mengukur aspek-aspek seperti kontrol terhadap upah, pembatasan usaha, serta kebijakan persaingan usaha.

### **Suara dan Akuntabilitas (*Voice and accountability*)**

Para pemangku kebijakan baik pemerintah, pihak swasta serta masyarakat (*civil society*) memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat umum dan lembaga *stakeholder*. Kualitas akuntabilitas bergantung terhadap organisasi dan model keputusan yang digunakan, apakah nantinya akan menguntungkan pihak dalam atau luar organisasi. Akuntabilitas terbagi menjadi 4 faktor dimensi dalam sektor publik antara lain : 1). Akuntabilitas kejujuran dan hukum, 2). Akuntabilitas proses, 3). Akuntabilitas program, 4). Akuntabilitas kebijakan

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan data panel 8 negara di ASEAN dengan tahun 2011-2020. Variabel yang dipakai yakni pengendalian korupsi ( $X_1$ ), Stabilitas politik dan ketiadaan kerusuhan/terorisme ( $X_2$ ), Kualitas regulasi ( $X_3$ ), Suara dan Akuntabilitas ( $X_4$ ) Kemiskinan di negara-negara ASEAN ( $Y$ ). Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis regresi data panel dengan uji pemilihan *Fixed Effect Model* (FEM). Berikut model estimasi dalam penelitian ini antara lain :

$$POV_{it} = \alpha + \beta_1 COC_{it} + \beta_2 POL_{it} + \beta_3 REG_{it} + \beta_4 VOICE_{it} + e_{it} \quad (1)$$

Dimana:  $POV_{it}$  adalah kemiskinan,  $COC$  adalah pengendalian korupsi,  $POL$  adalah stabilitas politik dan ketiadaan kerusuhan,  $REG$  adalah kualitas regulasi,  $VOICE$  adalah suara dan akuntabilitas,  $\alpha$  adalah nilai konstanta atau intersep,  $i$  adalah *cross section*,  $t$  adalah *time series*,  $\beta$  adalah koefisien regresi atau slope dan  $e_{it}$  adalah error term.

Variabel terikat (*dependen variable*) dalam penelitian ini adalah Kemiskinan ( $Y$ ) merupakan Ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar dengan satuan persen. Sementara yang menjadi variabel bebas ( *Independen Variable* ) adalah Tata kelola Pemerintah yang terdiri dari 1) Korupsi Kontrol (COC), 2) Stabilitas politik dan ketiadaan kerusuhan/terorisme (POL), 3) Kualitas Regulasi (REG), dan 4) Suara dan Akuntabilitas (VOICE).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan dibutuhkan masyarakat yang mampu dan Dalam penelitian ini pengujian dilakukan dengan menggunakan *Eviews10* dengan jumlah data observasi sebanyak 80.

Berdasarkan hasil estimasi pada tabel 2 menunjukkan hasil dari pengolahan data sekunder dengan menggunakan *Eviews10* diperoleh persamaan regresi panel sebagai berikut:

$$Poverty_{it} = 29.14504 - 0.161920COC_{it} - 0.144823POL_{it} - 0.147726 REG_{it} + 0.095592VOICE_{it} \quad (1)$$

Berdasarkan hasil estimasi tabel diatas dapat diketahui nilai t-hitung dari masing-masing variabel. Untuk mengetahui nilai t-tabel maka dicari terlebih dahulu  $\alpha = 0,05$  dengan derajat kebebasan (df)  $n-k$ , dimana  $n$  adalah jumlah data dan  $k$  adalah jumlah variabel bebas. Nilai derajat kebebasan dicari  $80 - 4 = 76$ , maka memperoleh hasil nilai t-tabel sebesar 1,66515.

**Tabel 2. Hasil Estimasi Fixed Effect Model**

Dependent Variable: Y					
Method: Panel Least Squares					
Periods included: 10					
Cross-sections included: 8					
Total panel (balanced) observations: 80					
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.	
C	29.14504	4.097961	7.112082	0.0000	
COC	-0.161920	0.090471	-1.789758	0.0779	
POL	-0.144823	0.070547	-2.052869	0.0439	
REG	-0.147726	0.088129	-1.676237	0.0983	
VOICE	0.095592	0.110355	0.866225	0.3894	
Effects Specification					
Cross-section fixed (dummy variables)					
R-squared	0.895650	Mean dependent var		15.06125	
Adjusted R-squared	0.878769	S.D. dependent var		8.634219	
S.E. of regression	3.006278	Akaike info criterion		5.176764	
Sum squared resid	614.5642	Schwarz criterion		5.534068	
Log likelihood	-195.0706	Hannan-Quinn criter.		5.320017	
F-statistic	53.05916	Durbin-Watson stat		0.805675	
Prob(F-statistic)	0.000000				

Sumber: Data Diolah, 2023

### **Pengaruh Tata Kelola Pemerintah terhadap Kemiskinan di Negara-negara ASEAN**

Hasil analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini membuktikan bahwa secara simultan (bersama-sama) tata kelola pemerintah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan di negara-negara ASEAN. Namun secara parsial hanya satu dimensi stabilitas politik dan ketiadaan kerusuhan/terorisme yang memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pengurangan kemiskinan.

Dimensi tata kelola yang lain seperti pengendalian korupsi dan kualitas regulasi tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan meskipun memiliki hubungan negatif, serta dimensi suara dan akuntabilitas berpengaruh positif dan tidak juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan.

Hal ini dibenarkan oleh teori Musgrave (dalam Palayukan, 2019) yang mengembangkan model pembangunan dengan menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah menjadi tiga kelompok bagian yang di antaranya; peranan alokasi, peranan distribusi, dan peranan stabilisasi. Dalam teori ini pemerintah memiliki peran penting dalam memberantas korupsi.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sumarto et al., 2004) yang mengatakan bahwa dampak tata kelola yang buruk akan berdampak buruk juga terhadap kemiskinan. Dalam penelitiannya menunjukkan dampak negatif tata kelola merupakan bentuk nyata, sehingga secara sistematis mempengaruhi banyak orang dalam upaya menanggulangi kemiskinan.

Adapun rincian hasil dari setiap variabel tata kelola pemerintahan yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

### **Pengaruh Pengendalian Korupsi terhadap Kemiskinan di Negara-negara ASEAN**

Berdasarkan dari hasil analisis data pengujian hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini dapat dilihat bahwa pengendalian korupsi memiliki pengaruh negatif dan tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan di negara-negara ASEAN. Artinya setiap peningkatan dalam pengendalian korupsi akan mengakibatkan penurunan terhadap kemiskinan di negara-negara ASEAN. Ini dibuktikan dengan nilai probabilitas sebesar  $0,0779 > 0,05$  dan nilai koefisien regresi sebesar  $-0,161920$ .

Pengendalian korupsi memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan disebabkan dengan mengendalikan korupsi yang ada pada pemerintahan/swasta membuat peluang untuk terjadinya penyalahgunaan kekuasaan/jabatan yang dimiliki seseorang untuk kepentingan pribadi/kelompok dapat dikurangi serta dikontrol sehingga anggaran dan kebijakan yang ditetapkan dapat tepat sasaran terhadap masyarakat miskin.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan (Oliveira da Silva et al., 2022) yang mengemukakan bahwa pengendalian korupsi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Dalam penelitiannya juga mengemukakan bahwa pengendalian korupsi terdapat hubungan kausalitas terhadap kemiskinan serta korupsi dapat mempengaruhi pendapatan kelompok orang miskin dan garis kemiskinan.

### **Pengaruh Stabilitas Politik dan Ketiadaan Kerusuhan/Terrorisme terhadap Kemiskinan di Negara-negara ASEAN**

Berdasarkan hasil analisis data pengujian penelitian dapat dilihat bahwa stabilitas politik dan ketiadaan kerusuhan/terrorisme memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di negara-negara ASEAN. Artinya apabila stabilitas politik dan ketiadaan kerusuhan/terrorisme meningkat akan mengakibatkan penurunan terhadap kemiskinan. Ini dibuktikan dengan nilai probabilitas sebesar  $0,0439 < 0,05$  dan nilai koefisien regresi sebesar  $-0,144823$ .

Stabilitas politik dan ketiadaan kerusuhan/terrorisme memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan disebabkan karena dengan terjadinya ketidakstabilan politik ataupun kekerasan bermotif politik, tekanan pemerintah tidak teratur, pengalihan kekuasaan pemerintah secara tidak teratur, gejolak sosial, konflik bersenjata, protes, terorisme, ketegangan internasional, maupun konflik eksternal dan internal mengakibatkan perekonomian tidak stabil yang mengganggu pertumbuhan ekonomi sehingga membuat masyarakat sulit untuk membangun dan memperbaiki hidupnya maupun keluarganya (Mina, 2012).

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan (Li et al., 2021) yang mengemukakan bahwa kestabilan politik merupakan dasar dalam pelaksanaan pengentasan

kemiskinan dan revitalisasi perdesaan yang terarah. Langkah-langkah lebih sulit untuk mengatasi kemiskinan terutama jika di wilayah tersebut terjadinya ketidakstabilan politik, institusi lemah, ekonomi rapuh, konflik dan bencana alam.

### **Pengaruh Kualitas Regulasi terhadap Kemiskinan di Negara-negara ASEAN**

Berdasarkan hasil analisis data pengujian penelitian diatas dapat dilihat bahwa kualitas regulasi memiliki dampak negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di negara-negara ASEAN. Artinya apabila kualitas regulasi meningkat maka tingkat kemiskinan dinegara-negara ASEAN akan menurun. Ini dibuktikan dengan nilai probabilitas  $0,0983 > 0,05$  dan nilai koefisien regresi sebesar  $-0,147726$ .

Kualitas regulasi memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan disebabkan karena dengan kualitas regulasi yang baik dapat membuat peraturan yang dirancang sebagai alat kelembagaan yang sangat diperlukan bagi warga negara, pebisnis, dan pemerintah. Kualitas peraturan mencerminkan seperangkat prinsip yang berfokus pada cara negara mempromosikan reformasi struktural pada kerangka peraturannya untuk memastikan proses yang kuat, transparan, akuntabilitas, dan berwawasan ke depan yang mendukung penciptaan dan pertumbuhan perusahaan, peningkatan produktivitas, kompetisi, investasi dan perdagangan internasional.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan (Johnson et al., 1998) yang mengatakan bahwa kualitas regulasi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, yang baik membantu kaum miskin dengan menciptakan peluang untuk meningkatkan taraf hidup dengan cara meningkatkan pendapatan.

### **Pengaruh Suara dan Akuntabilitas terhadap Kemiskinan di Negara-negara ASEAN**

Berdasarkan hasil analisis pengujian data penelitian diatas dapat dilihat bahwa suara dan akuntabilitas memiliki dampak positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di negara-negara ASEAN. Artinya apabila suara dan akuntabilitas meningkat akan mengakibatkan kemiskinan di negara-negara ASEAN akan meningkat juga. Ini dibuktikan dengan nilai probabilitas sebesar  $0,3894 > 0,05$  dan nilai koefisien regresi sebesar  $0,095592$ .

Suara dan akuntabilitas memiliki pengaruh yang positif terhadap kemiskinan disebabkan karena suara dan akuntabilitas memiliki kemampuan untuk meningkatkan daya pinjam/utang suatu pemerintah karena akuntabilitas yang lebih besar diperlukan dalam pemungutan pajak pemerintah dan pengeluaran pendapatan karena memiliki hubungan langsung dengan pembuat keputusan politik. Institusi pemerintah juga memiliki keterbatasan dalam menegakkan pinjaman negara yang lebih baik dengan menyediakan sarana seperti akuntabilitas pemilu (Mehmood et al., 2021).

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Sittha, 2012) yang mengemukakan bahwa suara dan akuntabilitas memiliki korelasi yang tinggi dan tidak signifikan secara statistik terhadap kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi. Dalam penelitiannya mengemukakan bahwa pengentasan kemiskinan di Thailand berhasil melalui jalur politik yang bukan melalui jalur ekonomi.

## **SIMPULAN**

Tata kelola pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan dengan rincian sebagai berikut : 1) Pengendalian korupsi memiliki pengaruh yang negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di negara-negara ASEAN, 2) Stabilitas politik dan ketiadaan kerusuhan/terorisme berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di negara-negara ASEAN, 3) Kualitas regulasi berpengaruh negatif dan tidak terdapat pengaruh

signifikan terhadap kemiskinan di negara-negara ASEAN, 4) Suara dan akuntabilitas berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di negara-negara ASEAN. Dan oleh sebab itu Pemerintah diharapkan dapat menjalankan tata kelola yang baik agar kebijakan dan perekonomian dapat berjalan secara efektif sehingga dapat menurunkan tingkat kemiskinan yang ada.

## DAFTAR RUJUKAN

- Zamakhshari Baharuddin, A. R. (2019). Impeachment Perspektif Ketatanegaraan Indonesia Dan Ketatanegaraan Islam. *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 19(1). <https://doi.org/10.24252/al-risalah.v19i1.9689>
- Chambers, R. (2006). Concepts and measures What is poverty? *International Poverty Centre Poverty In Focus*, December.
- Chubb, J. E., & Peterson, P. E. (1989). The Problem of Governance. *The Brookings Review*, 7(2), 48. <https://doi.org/10.2307/20080095>
- Johnson, S., Kaufmann, D., & Zoido-Lobato, P. (1998). Regulatory Discretion and the Unofficial Economy. In *American Economic Review* (Vol. 88, Issue 2).
- Kamal Ramlan, W., Sulaiman, N., & Chei Siang, L. (2011). Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Kemiskinan di Malaysia: Satu Pendekatan Dinamik Economic Growth and Poverty Reduction in Malaysia: A Dynamic Approach. *Prosiding PERKEM VI Jilid 1*, 1.
- Li, Y., Wu, W., & Wang, Y. (2021). Global poverty dynamics and resilience building for sustainable poverty reduction. *Journal of Geographical Sciences*, 31(8). <https://doi.org/10.1007/s11442-021-1890-4>
- Liu, W., Li, J., & Zhao, R. (2020). Rural Public Expenditure and Poverty Alleviation in China: A Spatial Econometric Analysis. *Journal of Agricultural Science*, 12(6). <https://doi.org/10.5539/jas.v12n6p46>
- Mehmood, W., Mohd-Rashid, R., Aman-Ullah, A., & Ong, C. Z. (2021). Country-Level Institutional Quality and Public Debt: Empirical Evidence from Pakistan. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(4), 0021–0032. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no4.0021>
- Mina, W. M. (2012). The Institutional Reforms Debate and FDI Flows to the MENA Region: The “Best” Ensemble. *World Development*, 40(9). <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2012.04.026>
- Oliveira da Silva, D., Lopes Ribeiro, L., Tatiwa Ferreira, R., Martins Costa, E., & Urano de Carvalho Castelar, P. (2022). Causality between corruption and poverty: An analysis for South American countries. *Estudios Económicos*, 39(79). <https://doi.org/10.52292/j.estudecon.2022.2818>
- Palayukan, M. (2019). PENGARUH BELANJA PEMERINTAH TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA: STUDI KASUS PROVINSI SULAWESI TENGGARA. *Jurnal BPPK: Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan*, 12(2). <https://doi.org/10.48108/jurnalbppk.v12i2.376>
- Rahayu, I. P., & Widodo, T. (2012). the Causal Relationship Between Corruption and Poverty in Asean : a General Method of Moments / Dynamic Panel Data Analysis Hubungan Kausalitas Antara Korupsi Dan Kemiskinan Di Asean : Generalized Method of Moments / Dynamic Panel Data. *Journal of Economics, Business, and Accountancy Ventura*, 15(3), 527–536.
- Razak, A., & Suhadak. (2019). PENGARUH WORLDWIDE GOVERNANCE INDICATORS DAN MACROECONOMIC TERHADAP IHSG ( Studi pada Negara Indonesia , Malaysia , Filipina , Singapura , dan Thailand Tahun. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 70(1).
- Sen, A., & Fields, G. S. (1983). Poverty, Inequality and Development. *The Economic Journal*, 93(369). <https://doi.org/10.2307/2232194>
- Sittha, P. V. (2012). Governance and Poverty Reduction in Thailand. *Modern Economy*, 03(05). <https://doi.org/10.4236/me.2012.35064>
- Sumarto, S., Suryahadi, A., & Arifianto, A. (2004). Tata Kelola Pemerintah dan

Penanggulangan Kemiskinan : Bukti-bukti Awal Desentralisasi di Indonesia. *Kertas Kerja SMERU*.

Wibowo, M. G. (2020). PERAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN (GOVERNANCE) SERTA BAURAN KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER DALAM PERTUMBUHAN EKONOMI: STUDI DI NEGARA-NEGARA ANGGOTA ORGANISASI KERJASAMA ISLAM (OKI). *Disertasi*.

Yulianto, T. (2005). Fenomena Program-Program Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Klaten (Studi Kasus Desa Jotangan Kecamatan Bayat). *Tesis*, 1.